

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, Adami, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Efendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014.
- Hamzah, Andi, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet Ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2006. *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Cet Ke-13*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- J. Van Kan dan J.H Beekhuis, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jhony, Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: PT. Bayu Media Publishing.
- Marbun, R., 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moloeng, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda Karya.

- Muhammad Rasti H., 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Prima Aksara.
- Prinst, Darwan, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Djembatan, Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung. Mandar Maju.
- Ramelan, 2006. *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Rosita, Lily dan Sasangka, Hari. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif.*, Raja Grafindo Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## Jurnal

- Gautama, Mohammad Isa. 2017. *Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional*, Jurnal Socius, Vol 4, No 1, 2017.
- Hafidz, Jawade. 2009. *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol 44 No 118, 2009
- Hariman Satria, *Ke Arah Pergesaran Beban Pembuktian*, (Jurnal INTEGRITAS Volume 3, Nomor 1, Maret 2017).
- Nola, Luthvi Febryka, *Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK*, (Info Singkat Hukum Vol. V, No. 24/II/P3DII/Desember/2013).
- Pudjianto, Aldian, dkk. *Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, (DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 7, Nomor 3, Tahun 2018).

## Website/Internet

- Detikcom, "Memahami Istilah Operasi Tangkap Tangan di Kasus Patrialis Akbar", 30 Januari 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3409476/memahami-istilah-operasi-tangkap-tangandi-kasus-patrialis-akbar>, diakses tanggal 20 Februari 2017.
- KPK, Indeks Presepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia di Angka 37, 2018, <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4164-indeks-presepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37> diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19.20 WIB
- R. Faiz, Adhi. Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan, 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e2a68c08e64/kolektif-kolegial-pimpinan-kpk-dalam-pelaksanaan-kewenangan-broleh--tb-a-adhi-r-faiz--sh--mh-> , diakses pada tanggal 20 januari 2019 pukul 20.20 WIB
- Tempo, OTT Hakim PN Jaksel, 17 Hakim Ini Pernah Dicokok KPK, 2018 <https://nasional.tempo.co/read/1150699/ott-hakim-pn-jaksel-17-hakim-ini-pernah-dicokok-kpk/full&view=ok> diakses pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 20.21 WIB
- Tempo. KPK Ungkap Kronologi OTT Hakim Pengadilan Jakarta Selatan <https://nasional.tempo.co/read/1150608/kpk-ungkap-kronologi-ott-hakim->

pengadilan-jakarta-selatan diakses pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 20.00 WIB

“Penyidikan Sebagai Bentuk Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum”, (<http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/penyidikan-sebagai-bentuk-kewenangan-kepolisiandalam-penegakan-hukum/>), di akses Pukul 22:00 wib Tanggal 20 Mei 2019

